

KEBIJAKAN PEMERINTAH TURKI TERHADAP PENGUNGSI ROHINGYA DI BANGLADESH PADA TAHUN 2016-2017

Oleh:

Muhammad Anshari Mahfudz

20150510147

Ilmu Hubungan Internasional

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email: aanmahfudz13@gmail.com

Abstract

The Rohingya are a Muslim ethnic group, who often get discriminatory treatment and inhumane arrangements by the Myanmar government. This condition caused the Rohingya to flee to Bangladesh. However, there are so many Rohingya refugees in Bangladesh, this has caused the Bangladesh government to decide to start rejecting the Rohingya who want to go to Bangladesh. This received a response from the Turkish government asking Bangladesh to accept Rohingya refugees who wanted to go to Bangladesh.

Turkey is active in helping aid issues in various regions, especially in the East and Asia. This cannot be separated from the role of the AKP. Turkey's involvement in the Rohingya refugee crisis in Bangladesh was driven by several factors. The first is Turkey's response to the human rights oppression that occurred in Rohingya ethnic groups, and the second is the changes in Turkish foreign policy under Adalet ve Kalkinma Partisi (AKP). These factors led to Turkey's involvement in the case of the Rohingya Refugee crisis in Bangladesh.

Keywords: *Turkey, Bangladesh, Rohingya Refugees, Human Rights, Turkish Foreign Policy.*

PENDAHULUAN

Rohingya adalah kaum minoritas Muslim yang menggunakan bahasa Indo-Eropa yang mirip dengan bahasa Bengali. Mereka tinggal di negara bagian Rakhine Utara, sebuah desa pesisir di Myanmar. Menurut Menteri Imigrasi dan Kependudukan Myanmar Khin Yi, ada sekitar 1,33 juta orang Rohingya di negaranya. Namun, pemerintah Myanmar tidak mengakui etnis Rohingya sebagai warga negara atau kelompok etnis mereka. Konflik antara etnis Rohingya dengan etnis Rakhine sudah terjadi sejak puluhan tahun yang lalu, dimana etnis Rohingya sendiri sebagian besar adalah Muslim dan etnis Rakhine merupakan etnis mayoritas yang mayoritasnya merupakan penganut Buddha. Etnis Rohingya merupakan etnis minoritas masih dianggap ilegal oleh pemerintahan Myanmar (Waluyo, 2013, p. 838).

Selama beberapa dekade etnis Rohingya telah mengalami diskriminasi hukum dan sosial. Etnis Rohingya harus tunduk pada banyaknya batasan yang ditetapkan oleh pemerintah Myanmar dalam kehidupan sehari-hari mereka, dimana mereka dilarang bepergian tanpa izin dan dilarang

bekerja di luar desa mereka, mereka juga tidak dapat menikah tanpa izin dan, karena adanya pembatasan gerak, mereka tidak memiliki akses yang memadai terhadap peluang pekerjaan, perawatan medis dan pendidikan. Selain itu, adanya kecemburuan terhadap etnis Rohingya, membuat mereka beranggapan bahwa meningkatnya populasi etnis Rohingya akan mengurangi hak etnis Rakhine terhadap lahan dan perekonomian, terlebih di wilayah Rakhine yang merupakan pusat dari kehidupan etnis Rohingya (Waluyo, 2013, pp. 838-839).

Banyak tindakan kekerasan maupun tindak diskriminasi lainnya yang dilakukan kepada etnis Rohingya, seperti pembakaran pemukiman, pembunuhan, pemerkosaan, dsb. Tindakan diskriminasi tersebut membuat banyak etnis Rohingya yang mengungsi ke berbagai wilayah, salah satunya adalah ke Bangladesh. Seperti pada 9 oktober 2016 terjadi serangkaian insiden kekerasan dan operasi militer yang dilakukan oleh aparat karena adanya serangan yang di duga dilakukan oleh ratusan etnis Rohingya yang menyebabkan 9 aparat tewas, dan sebanyak 8 anggota penyerangan tewas dibunuh oleh aparat (Wijaya, 2016). Lebih dari 87.000 orang Rohingya melarikan diri ke Bangladesh untuk mencari perlindungan. Bahkan hingga 25 agustus 2017, ada sekitar 655.500 pengungsi Rohingya yang telah melintasi perbatasan Bangladesh untuk mengungsi dikarenakan serangan yang telah dilakukan sebelumnya (European Commission, 2018, p. 4).

Bangladesh sendiri merupakan negara yang miskin dan padat penduduk. Bangladesh merupakan salah satu negara yang menghadapi kemiskinan di mana dapat dilihat dari banyaknya pengangguran di negara tersebut. Masuknya pengungsi dari Rohingya ke Bangladesh menyebabkan dampak yang negatif terhadap warga lokal, selain itu kedatangan banyak pengungsi dari etnis Rohingya ke Bangladesh tidak menjadi isu kemanusiaan saja bagi Bangladesh, tetapi juga merupakan sebuah potensi yang dapat mengancam stabilitas keamanan dalam negeri Bangladesh sendiri (Mery & Olivia, 2015, pp. 1194-1196).

Bangladesh yang merupakan negara miskin yang padat penduduk menjadikan pengungsi dari Rohingya menjadi beban yang berat bagi perekonomian Bangladesh (Mubyarto, 2004). Selain menjadi beban bagi perekonomian Bangladesh, kedatangan para pengungsi Rohingya juga menjadi isu keamanan bagi negara Bangladesh karena ada sekitar 163 juta jiwa jumlah penduduk pada tahun 2016 di negara yang luas wilayahnya hanya 147.570 km². Hingga desember 2017, diperkirakan ada sekitar 650.000 pengungsi Rohingya yang telah meninggalkan Myanmar untuk menuju ke Cox's Bazar, Bangladesh sejak akhir agustus 2017 (UNHCR, 2017).

Banyaknya jumlah pengungsi Rohingya di Bangladesh membuat pemerintah Bangladesh kesulitan untuk menangani para pengungsi, hal ini dapat dilihat dari buruknya fasilitas kamp-kamp pengungsian bagi pengungsi Rohingya yang ada di Bangladesh. Keadaan ini membuat pemerintah Bangladesh mulai menolak pengungsi dari Rohingya untuk masuk ke Bangladesh. Hal ini membuat berbagai sikap dari beberapa negara atas keadaan yang dialami oleh pengungsi Rohingya, salah satunya adalah Turki.

Turki pada masa kepemimpinan Erdogan memang dikenal aktif dalam membantu menangani isu-isu kemanusiaan, dimana peran Turki dalam membantu mengatasi permasalahan kemanusiaan ini bukan hanya dilakukan kepada etnis Rohingya saja, tetapi di berbagai negara lain seperti di Palestina dan negara lainnya. Sedangkan dalam menanggapi kasus krisis pengungsi Rohingya di Bangladesh. Menteri luar negeri Turki, Mevlüt Çavuşoğlu meminta Bangladesh untuk membuka pintu kepada pengungsi Rohingya yang ingin masuk ke Bangladesh. Turki melalui Mevlüt Çavuşoğlu menyatakan akan menanggung semua biaya untuk pengungsi Rohingya apabila Bangladesh bersedia untuk menerima pengungsi rohingya kembali (Novia & Murdaningsih, 2017). Selain itu Turki juga banyak memberikan bantuan terhadap pengungsi rohingya, baik bantuan kemanusiaan ataupun bantuan untuk memenuhi kebutuhan pokok pengungsi, seperti makanan, obat-obatan, dsb. Presiden Erdogan juga mengkritisi banyaknya negara yang tidak peduli terhadap kondisi pengungsi etnis Rohingya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian secara kualitatif dengan analisa secara deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan situasi yang dianggap relevan dan jelas atas dasar fakta-fakta yang terjadi dan kemudian akan di simpulkan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data yang berdasarkan pada *library research* atau studi pustaka. Studi pustaka adalah proses untuk memperoleh dan mengumpulkan data atau informasi melalui berbagai macam media kepustakaan, seperti buku-buku, jurnal, artikel ilmiah, dokumentasi, dan hasil penelitian, serta sumber informasi penunjang lainnya, seperti berita media massa, dan penelusuran data online. Dengan metode yang dilakukan, penulis berharap dapat menemukan data-data yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Hasil penelitian ini kemudian akan dianalisis secara kualitatif yaitu permasalahan digambarkan fakta-fakta yang ada, dimana fakta yang satu dihubungkan dengan fakta yang lainnya, kemudian ditarik sebuah kesimpulan.

KERANGKA PEMIKIRAN

A. Konsep Hak Asasi Manusia

Mengutip dari buku *Theories of International Relations*, Scott Burchill yang mengemukakan bahwa ide dari hak asasi manusia secara universal berasal dari tradisi Hukum Alam, dalam perdebatan di Barat tentang pencerahan 'hak manusia' dan dalam pengalaman individu yang berjuang melawan aturan negara yang sewenang-wenang. Manusia dikatakan diberkahi, hal ini murni dengan alasan kemanusiaan, dengan hak-hak fundamental, manfaat dan perlindungan tertentu. Hak-hak ini dianggap inheren karena mereka tidak dapat dilepaskan atau diambil dan bersifat universal karena Hak kemanusiaan itu berlaku untuk semua orang tanpa memandang kebangsaan, status, jenis kelamin atau ras mereka (Burchill & Linklater, 2005, p. 67).

HAM merupakan tanggung jawab yang diberikan oleh negara berupa perlindungan hukum dengan hak asasi disetiap manusia dengan mengutamakan keadilan dan kesetaraan di depan hukum. Konsep HAM yang seringkali diidentikkan dengan kebebasan dalam berbagai dimensi tentunya tidak lepas dari kontribusi pemikiran Liberal di dalamnya. Perluasan hak-hak tersebut bagi semua manusia memiliki tempat yang sangat penting di dalam pemikiran liberal tentang kebijakan luar negeri dan hubungan internasional, dikarenakan oleh dua alasan. Pertama, hak-hak ini memberikan landasan hukum bagi emansipasi, keadilan, dan kebebasan manusia. Penolakan suatu etnis, kelompok atau manusia oleh otoritas negara adalah penghinaan terhadap martabat semua manusia. Kedua, negara-negara yang memperlakukan warganya sendiri secara etis dan membiarkan mereka berpartisipasi dalam proses politik dianggap tidak terlalu berperilaku agresif secara internasional.

Kaum liberal umumnya memiliki pandangan yang positif mengenai sifat manusia. Mereka meyakini bahwa setiap individu memiliki kepentingan diri sendiri dan bersaing terhadap suatu hal. Tetapi kaum liberal juga meyakini bahwa individu dapat terlibat dalam aksi sosial yang kolaboratif dan kooperatif baik domestik maupun internasional (Jackson & Sorensen, 2013, p. 175). Selain itu Dalam laporannya, Vincent (1986) mengidentifikasi hak individu sebagai satu-satunya hak asasi manusia yang berkemungkinan mendapatkan dukungan oleh konsensus global dan komunitas dunia, terlepas dari perbedaan agama atau ideologi (Burchill & Linklater, 2005, p. 68). Sehingga individu atau kelompok yang mengalami kejahatan Hak Asasi Manusia berhak untuk di dukung oleh negara ataupun komunitas dunia.

B. Teori Pengambilan Keputusan Luar Negeri

Menurut William D. Coplin didalam buku Pengantar Politik Internasional, politik luar negeri bisa dipandang sebagai output dari tiga pertimbangan yang mempengaruhi dibuatnya suatu keputusan, yaitu kondisi politik dalam negeri, kondisi ekonomi dan militer, dan konteks internasional, yang merupakan posisi khusus suatu negara dalam hubungannya terhadap negara lain di dalam suatu sistem internasional (Coplin & Marbun, 1992, p. 30).

Akan tetapi di dalam penelitian ini kondisi politik dalam negeri merupakan faktor yang dominan dari keterlibatan Turki di dalam krisis Rohingya yang ada di Bangladesh. Hal ini dikarenakan pentingnya peran aktor domestik Turki di dalam pengambilan keputusan luar negerinya. Dalam hubungan internasional, kebijakan luar negeri suatu negara merupakan salah satu alat pendukung untuk mencapai kepentingan nasional negara tersebut. Perumusan dari kebijakan luar negeri sendiri dari negara satu dengan negara lainnya dapat berbeda-beda tergantung dari beberapa aspek dan pertimbangan tertentu yang mempengaruhi kebijakan tersebut.

Menurut Coplin, di dalam sistem pengaruh kebijakan (*policy influence system*) negara manapun bisa dianggap sebagai serangkaian hubungan timbal balik antara para pengambil keputusan dengan para aktornya salah satunya adalah *partisan Influencers* yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan suatu kebijakan luar negeri negara tersebut. *Partisan Influencers* atau partai yang mempengaruhi bertujuan untuk menyalurkan tuntutan-tuntutan masyarakat, yaitu suatu tuntutan kepada para pengambil keputusan yang dapat mempengaruhi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah negara tersebut. Dimana para influencers ini mempengaruhi suatu kebijakan dengan cara menekan para penguasa dan dengan menyediakan personel yang dapat berperan dalam pengambilan keputusan (Coplin & Marbun, 1992, p. 84).

PEMBAHASAN

A. Hubungan Turki dengan Bangladesh

Pergeseran arah orientasi Politik Luar Negeri Turki yang awalnya lebih Pro-Barat kini secara perlahan mulai bergeser orientasinya ke Negara Dunia Timur. Tidak hanya ke bagian Timur akan tetapi Turki juga mulai meningkatkan Hubungannya ke daerah Asia. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana Turki yang lebih aktif dalam menangani kasus-kasus kemanusiaan, seperti kasus krisis pengungsi Rohingya yang ada di Bangladesh. Pendekatan penting AKP adalah untuk menggabungkan nilai sejarah-budaya dan sosial-budaya dengan tujuan ekonomi dan politik.

Aspek budaya dan sejarah diasumsikan membuka jalan bagi objek kebijakan luar negeri AKP yang proaktif. Bangladesh sendiri cocok dengan skema ini. (Baba, 2017, p. 577)

Meskipun secara geografis Turki dan Bangladesh jauh terpisah satu sama lain, akan tetapi elemen sosial dan budaya mereka memiliki beberapa kesamaan yang menarik. Faktanya, kesamaan ini pengaruhnya jauh lebih kuat daripada ikatan kelembagaan dan politik. Elemen paling penting dari kesamaan tersebut adalah cara orang Bengali melihat model Islam di Turki. Salah satu contoh utama adalah pentingnya tasawuf di kalangan Muslim Bengali. Ottoman adalah pendukung besar tasawuf. Kedua, pada abad ke-20, Muslim Bengali mendukung integritas teritorial Kekaisaran Ottoman, dimana mereka melihat Kekhalifahan Utsmaniyah sebagai simbol persatuan Muslim di seluruh dunia. Dukungan dari Muslim Bengali tidak hanya untuk lembaga kekhalfahan tetapi juga kepada bangsa Turki, yang mewarisi kekuasaan Ottoman (Ahmed, 2014).

Dan selama Perang India-Pakistan pada tahun 1965, Turki mendukung Pakistan melalui peralatan militer dan transfer tenaga medis. Selama Perang Pembebasan Bangladesh pada tahun 1971, hubungan Turki dan Bangladesh sangat rumit karena dukungan berkelanjutan Turki terhadap Pakistan. Namun, setelah kekalahan Pakistan, Bangladesh didirikan, dan Turki mengakui Bangladesh sebagai negara pada 22 Februari 1974 pada kesempatan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) KTT di Lahore. Turki sendiri adalah salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Bangladesh. Kedutaan Besar Turki di Dhaka kemudian diresmikan pada tahun 1976 dan Kedutaan Besar Bangladesh di Ankara pada tahun 1981. Hingga tahun 2009, Turki dan Bangladesh menyepakati beberapa perjanjian. Kesepakatan tersebut mencakup berbagai macam bidang, yaitu perdagangan, kerja sama ekonomi dan teknis, budaya, pelatihan dan pendidikan militer, perbankan, maritim, dan perpajakan ganda. Tahun 2009 adalah titik balik dalam hubungan bilateral Turki dan Bangladesh. Dengan memacu proaktifitas dalam kebijakan luar negeri Turki, Ankara mulai meningkatkan pengaruh Turki di bagian-bagian dunia yang sebelumnya bukanlah fokus utama dari Turki. Asia Selatan adalah salah satunya. Karenanya, Presiden Abdullah Gül mengunjungi Bangladesh pada bulan Februari tahun 2010. Selama kunjungan tersebut, pejabat Turki dan Bengali memutuskan untuk membentuk Dewan Bisnis antara Turki-Bangladesh (Baba, 2017, p. 578).

Hubungan bilateral kedua negara semakin dekat terutama dengan adanya kunjungan Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan ke Dhaka pada tahun 2010. Kunjungan Erdogan adalah kunjungan Perdana Menteri Turki yang pertama ke Bangladesh setelah 21 tahun dengan agenda

yang ekstensif. Agenda Erdogan sesuai dengan tujuan hubungan antar-negara Asia, yang terutama bersifat ekonomi-komersial. Erdogan menyatakan bahwa peningkatan volume perdagangan dari 47 juta menjadi 658 juta USD dari tahun 2002 hingga 2009 tidak mencerminkan potensi aktual antara kedua negara. Harapan Erdoğan adalah untuk meningkatkan volume ini menjadi 3 miliar USD hingga tahun 2015. Upaya Turki berlanjut pada tahun 2012. Sejak itu, Bangladesh dan Turki telah melakukan pembicaraan untuk menandatangani perjanjian perdagangan bebas.

Bangladesh dan Turki telah menandatangani protokol bersama mengenai perdagangan dan investasi pada tahun 2012. Dimana komisi Ekonomi Bangladesh-Turki telah mengadakan pertemuan beberapa kali untuk membahas cara-cara dalam meningkatkan perdagangan dan investasi bilateral kedua negara. Pada tahun yang sama, Badan Kerjasama dan Koordinasi Turki (TIKA) meningkatkan kegiatannya di Bangladesh. Dimana TIKA membuka 10 klinik medis, laboratorium komputer, pusat pendidikan. Kegiatannya saat ini adalah pendidikan, kesehatan, pertanian, dan infrastruktur administrasi pendukung di Bangladesh. (Baba, 2017, p. 580) Meskipun hubungan komersial tidak bisa mencapai volume ini, dan pada tahun 2016 nilai impor dan ekspor naik hingga 1 miliar USD. Selama kunjungan Turki dan Para pemimpin Bangladesh juga membahas kerja sama di bidang kesehatan, pariwisata, pendidikan, dan terorisme (Aira, 2010).

Akan tetapi, pada tahun 2016 jugalah, hubungan diplomatik antara kedua negara menjadi kompleks ketika Bangladesh mengecam permintaan Turki yang secara berturut-turut meminta untuk membebaskan beberapa pemimpin Jamaat-e-Islami Bangladesh yang telah dihukum karena kejahatan perang selama Perang Pembebasan Bangladesh oleh Pengadilan Kejahatan Internasional di Bangladesh pada 2013. Ketika Moulana Motiur Rahman Nizami, ketua Jamaat-e-Islami, Partai Politik Islam terbesar di Bangladesh Jamaat-e-Islami dan aliansi Partai Bangladeshionalis yang berkuasa, dieksekusi pada 11 Mei 2016 (Ramani, 2016).

Meskipun terjadi ketegangan antara Turki-Bangladesh, faktor kedekatan sosial-budaya dan sejarah mampu mencegah hubungan bilateral kedua negara dari kehancuran. Duta Besar Bangladesh di Ankara, M. Allama Siddiki, menyatakan bahwa, ia yakin selama masa krisis tersebut, kedekatan politik-budaya antara Turki dan Bangladesh jauh lebih kuat dan lebih besar daripada masalah bilateral yang sedang dihadapi. Walaupun sempat terjadi ketegangan antara Turki dan Bangladesh, akan tetapi, hubungan kedua negara pulih dengan cepat (Zaman S. S., 2016).

Pada tahun 2017, sebuah komite perwakilan dari Bangladesh, yaitu otoritas Pengembangan Investasi dan Kamar Dagang dan Industri Metropolitan mengunjungi Turki pada bulan April-Mei 2017. Beberapa seminar diselenggarakan di Turki mengenai perdagangan dan investasi, yang dihadiri oleh 140 pengusaha Turki, pengusaha industri, dan investor. Di sana ditekankan bahwa 1,2 miliar USD volume perdagangan bilateral jauh di bawah potensi sebenarnya. Untuk meningkatkan volume ini, dikatakan bahwa perusahaan Turki harus berinvestasi lebih banyak di bidang petrokimia, konstruksi, hotel, pariwisata, dan perawatan kesehatan di Bangladesh. Disisi lain, Turki juga mendesak otoritas Bangladesh untuk lebih meningkatkan/meliberalisasi sistem perbankan, bea cukai, dan perpajakan mereka. Hal ini dikarenakan oleh kebutuhan akan investasi asing untuk mengatasi beberapa kesulitan perdagangan di Bangladesh. Meningkatnya hubungan antara pengusaha dan pejabat kedua negara juga memperkuat hubungan Turki dengan Bangladesh (Baba, 2017, pp. 581-582).

Selain itu, krisis pengungsi Rohingya yang ada di Bangladesh juga menyebabkan hubungan antara Turki dan Bangladesh semakin mendekat. Hal ini juga disebabkan oleh banyaknya bantuan yang dikirim oleh Turki untuk para pengungsi yang ada di Bangladesh, dimana Turki melalui Badan bantuan pemerintah Turki, Badan Kerjasama dan Koordinasi Turki (TIKA), telah mendistribusikan makanan yang kepada para pengungsi Rohingya di Bangladesh sejak 2016-2017 (Mahmud, 2017).

B. Kebijakan Pemerintah Turki terhadap pengungsi Rohingya di Bangladesh

Banyaknya jumlah pengungsi Rohingya yang ada di Bangladesh tentu membuat pemerintah Bangladesh kesulitan dalam menangani pengungsi Rohingya. Kondisi pengungsi Rohingya yang penuh dan sesak di Bangladesh membuat persediaan bantuan kemanusiaan oleh organisasi-organisasi kemanusiaan menjadi semakin menipis. Banyak permasalahan yang kemudian muncul di kamp pengungsian, seperti kekurangan makanan dan malnutrisi, permasalahan pelayanan kesehatan, persediaan air yang menipis, sanitasi, tempat tinggal, kesempatan dan kebebasan yang terbatas, pendidikan, serta beberapa hal lainnya. Akhirnya mereka terlibat dalam kegiatan-kegiatan ilegal yang mampu mengancam keamanan nasional Bangladesh (Yasyid, 2017, p. 1291). Situasi seperti ini membuat pemerintah Bangladesh memutuskan membuat kebijakan untuk menolak pengungsi Rohingya yang ingin memasuki wilayah Bangladesh. Pemerintah Bangladesh menolak para pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari konflik di Myanmar pada tahun 2016. Para penjaga perbatasan Bangladesh memulangkan kapal-kapal berisi pengungsi Rohingya, meski

oposisi di negara itu meminta pemerintah menyediakan perlindungan bagi warga minoritas Muslim tersebut (D, 2016).

Adanya Penolakan dari Bangladesh terhadap pengungsi Rohingya ini kemudian mendapatkan respon dari pemerintah Turki, karena seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Turki memang aktif dalam membantu kaum muslim yang mengalami tindakan kekerasan atau yang tertindas. Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu meminta Bangladesh untuk kembali menerima pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari konflik kekerasan di negara bagian Rakhine, Myanmar. Bahkan Turki bersedia untuk menanggung seluruh biaya yang dikeluarkan Bangladesh kepada pengungsi Rohingya. Kesediaan Turki untuk menanggung seluruh biaya Bangladesh untuk pengungsi Rohingya ini disampaikan Cavusoglu saat berbicara di kantor Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) untuk merayakan hari raya Idul Adha di Provinsi Antalya, pada Jumat, 1 September 2017 (Tempo.co, 2017).

Pada akhirnya, bulan Agustus dan September 2017, Bangladesh kembali menyambut kedatangan beberapa pengungsi secara tiba-tiba. Hal ini diikuti oleh gelombang kekerasan sebelumnya pada Oktober 2016, yang memaksa lebih dari 80.000 Rohingya melarikan diri Bangladesh. Penghormatan Bangladesh terhadap prinsip *non-refoulement* merupakan tindakan yang terpuji, dimana pada saat banyak negara lain membangun tembok untuk mencegah pengungsi Rohingya untuk memasuki wilayah mereka. Saat ini (2018), lebih dari 900.000 pengungsi Rohingya berada di Bazar Cox daerah di ujung selatan Bangladesh. Ini terdiri dari hampir 700.000 pendatang baru di atas lebih dari 200.000 pengungsi Rohingya sudah tinggal di daerah itu, setelah melarikan diri sebelumnya gelombang penganiayaan dan penindasan di Myanmar. Bangladesh terus membiarkan 11.432 pengungsi lainnya untuk memasuki wilayah Bangladesh sejak awal 2018 hingga akhir Juni 2018 (HRW, 2018).

Dalam laporan yang ditulis oleh Republic of Turkey Ministry of Interior Disaster and Emergency Management Authority yang berjudul *AFAD's Humanitarian Aid to Rohingya Refugees in Bangladesh – Report No: 1 – as of December 4th* disebutkan hingga tahun 2017, Kementerian Bencana dan Otoritas Manajemen Darurat Turki (AFAD) telah memberikan berbagai macam bantuan kemanusiaan kepada pengungsi Rohingya yang ada di Bangladesh, seperti (AFAD, 2017):

1) Makanan dan non-makanan

Di bawah koordinasi AFAD, lebih dari 43.000 paket makanan dibagikan kepada penduduk setempat. AFAD, *Turkish Red Crescent* dan TDV juga membangun fasilitas tempat penampungan. Sejak September 2017, TIKA juga telah menyumbang bantuan seperti menyediakan makanan panas untuk 25.000 pengungsi Rohingya yang berisi rumah sakit dan panti asuhan setiap hari. Selain itu, TIKA juga telah mengirimkan 60 ton berbagai bahan makanan, 100.000 set piring, gelas, selimut; tunjangan bahan bakar untuk 1.200 keluarga; susu bubuk untuk 1.000 keluarga. TDV juga menyediakan 7.498 peralatan dapur, 12.750 perlengkapan musim dingin, dan bantuan pakaian mengenai 6.000 pengungsi Rohingya.

2) Koordinasi Kamp dan Manajemen Kamp (CCM)

Untuk mendukung para pengungsi Rohingya yang membutuhkan tempat berteduh, “rumah bambu tahan topan” dirancang oleh para insinyur AFAD seiring meningkatnya jumlah pengungsi rohingya sejak agustus 2017 lalu. Sebanyak 2.065 rumah bambu akhirnya selesai pada Februari 2018 oleh AFAD dan ditempatkan di wilayah pengungsi Rohingya. Pembangunan 5.685 rumah bambu telah diselesaikan oleh AFAD. Bersebelahan dengan tempat di mana rumah-rumah bambu dibangun, badan-badan bantuan kemanusiaan Turki juga menyelesaikan pembangunan 5 jembatan, di samping pendirian 3 pusat cuci, pusat komunitas, tangki air, pusat pendidikan umum, 9 ruang sholat, 2 lapangan voli / sepak bola, sistem pembuangan limbah, 20 tempat penampungan sampah, 4 sistem energi surya dengan 4.538 panel surya, 48 titik penerangan dan 5 tempat bermain.

3) Kesehatan

Di bawah koordinasi AFAD dan Kementerian Kesehatan Turki, sebuah rumah sakit dibangun di Bangladesh dan akan beroperasi pada tahun 2018. Rumah sakit tersebut terdiri dari 8 poliklinik termasuk: bedah umum, ortopedi, ginekologi, emergency, pediatri, penyakit internal, triase, dan poliklinik penyakit menular. Sebanyak 30 personel dari Kementerian Kesehatan Turki ditugaskan untuk bekerja di rumah sakit ini yang gajinya juga ditanggung oleh AFAD. Pembangunan klinik bambu, ruang sholat, unit radiologi, kabin keamanan, saluran air, dan sistem oksigen sentral juga telah selesai dan juga ada 3 kendaraan ambulans dan antar-jemput yang diberikan ke berbagai rumah sakit di Cox's Bazar.

4) Air dan sanitasi

Sebanyak 33 sumur air dan 4 sumur laut dibuat di area kamp dan rumah sakit untuk menyediakan air yang bersih dan sanitasi yang higienis untuk pengungsi Rohingya oleh pemerintah Turki. Selain itu, ada sebanyak 141 toilet dan 124 kamar mandi yang dibangun.

5) Sekolah dan beasiswa

TIKA telah memulai proyek untuk membangun 100 sekolah semi-permanen bekerjasama dengan UNICEF, sejauh ini sebanyak 30 sekolah telah selesai. Yayasan Diyanet juga memiliki pusat pendidikan dan pusat pendidikan needlecraft di dalam area kamp. Yayasan ini memberikan dukungan kepada siswa Rohingya yang belajar di berbagai negara. Ini mencakup semua biaya 110 mahasiswa Rohingya yang belajar di berbagai departemen di Universitas Islam Internasional Chittagong di Bangladesh (Mehmet, 2018).

6) Meninjau situasi pengungsi

Untuk menanggapi kebutuhan yang luar biasa akan bantuan, pemerintah Turki telah meningkatkan kegiatan bantuan kemanusiaan untuk pengungsi Rohingya terutama para pengungsi Rohingya yang tinggal di Bangladesh pada tahun 2017. Berkat upaya Pemerintah Turki dan dukungan besar dari komunitas internasional, Dewan Keamanan PBB menghimbau Myanmar untuk menghentikan kekerasan. Pemerintah Turki juga mendesak masyarakat internasional untuk mengutuk dan menekan tindakan yang telah diambil oleh pemerintah Myanmar. Pemerintah Turki akan terus mendukung etnis Rohingya untuk memastikan keamanan akan hak-hak asasi mereka, namun pemerintah Turki tetap berharap proses repatriasi atau pemulangan etnis Rohingya ke kota asal mereka dapat terlaksana dengan baik dan hidup dalam kedamaian dan keamanan.

C. Faktor-Faktor Keterlibatan Turki dalam Kasus Krisis Pengungsi Rohingya di Bangladesh

1. Respon Turki Terhadap Penindasan HAM yang Terjadi pada Etnis Rohingya

Turki memang aktif dalam menangani permasalahan kemanusiaan yang terjadi di berbagai negara di dunia. Selama lebih dari satu dekade terakhir Turki telah memproyeksikan dirinya di luar negeri melalui bantuan kemanusiaan. Beberapa operasi Turki ini dilakukan dalam skala besar, dan dikelola dengan sangat baik dari awal hingga akhir, dan seringkali mendapatkan penghormatan dari masyarakat yang telah dibantu (Noor, 2015).

Turki sendiri merupakan negara peserta Konvensi tahun 1951 dan Protokol Tahun 1967 merupakan salah satu bentuk kepedulian masyarakat Internasional terhadap Status Pengungsi. Berdasarkan Konvensi dan Protokol tersebut, negara-negara yang telah meratifikasi harus bekerja sama dengan UNHCR dan membantu menjalankan fungsinya, yang ditetapkan didalam UNHCR tahun 1950 yang tujuannya adalah untuk mencegah dan memperjuangkan HAM. Fungsi lainnya adalah untuk melawan negara-negara yang melakukan tindakan pelanggaran atau kekerasan terkait isu kemanusiaan melalui perlindungan pengungsi. Turki adalah salah satu negara yang membantu dan bertanggung untuk menciptakan dan memelihara lingkungan internasional (Dani, 2017). Kemudian pasca kemenangan AKP dalam pemilihan November 2002, pemerintah AKP tidak hanya mempercepat laju demokratisasi di Turki akan tetapi juga memulai proses yang bertujuan melembagakan perlindungan hak asasi manusia dalam administrasi negara, dimana pemerintah Turki mengorganisir pembentukan organisasi dan legislatif yang terdiri dari struktur nasional untuk menangani berbagai macam pelanggaran dan kekerasan terhadap manusia (Casier, 2009, p. 7)

Menurut Dr. Altay Atli, seorang peneliti kawasan Asia-Pasifik di *Sabancı University's Istanbul Policy Center*, pada tahun 2016, Turki menjadi sumber bantuan kemanusiaan terbesar kedua di dunia, dengan total 6 miliar USD telah didistribusikan ke berbagai wilayah yang membutuhkan, peran utama Turki dalam permasalahan Rohingya memiliki dua komponen: Bantuan kemanusiaan, termasuk bantuan dana yang ditawarkan ke Bangladesh untuk menutupi biaya para pengungsi, dan yang kedua adalah inisiatif diplomatik, seperti membawa masalah ini ke PBB dan memobilisasi Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Dua komponen ini, diimplementasikan secara bersamaan. Presiden Erdogan, pada 10 September mendesak negara-negara Muslim untuk "menggunakan segala cara yang tersedia" untuk menghentikan "kekejaman" yang dilakukan terhadap Muslim Rohingya di Myanmar. "Kami ingin bekerja sama dengan pemerintah Myanmar dan Bangladesh untuk mencegah penderitaan kemanusiaan di kawasan itu," kata Erdogan pada sesi pembukaan pertemuan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) di ibukota Kazakhstan, Astana. Erdogan mengatakan Turki telah menawarkan bantuan, menambahkan bahwa itu diharapkan bahwa otoritas Bangladesh mengakui dan membantu Muslim Rohingya melarikan diri dari kekerasan (hurriytdailynews, 2017).

Turki juga membawa permasalahan Myanmar yang melibatkan etnis Rohingya ini ke agenda pertemuan Komite Tetap Dewan Parlemen Asia tentang Urusan Sosial dan Budaya yang

diselenggarakan pada 31 Agustus – 2 September, dan dihadiri oleh berbagai delegasi termasuk UEA. Atas desakan delegasi Turki, Myanmar termasuk dalam daftar negara-negara di ambang bencana kemanusiaan, selain Suriah, Irak, dan Yaman (Tokyay, 2017). Erdogan juga telah meyakinkan pemerintah Bangladesh untuk memberikan lebih banyak bantuan pada permasalahan Rohingya yang ada di Bangladesh. Selama pertemuan bilateral dengan Presiden M Abdul Hamid mengenai kegiatan KTT khusus Organisasi Kerjasama Islam (OKI) di Pusat Kongres dan Pameran Istanbul (ICECA) pada tahun 2017 (BSS, 2017).

Turki telah melakukan upaya dan bantuan yang sangat besar pada etnis Rohingya, Turki juga mendorong komunitas internasional untuk menunjukkan peran mereka terhadap krisis. Pemerintah Turki akan terus menyuarakan krisis kemanusiaan yang memengaruhi Rohingya dan juga akan mendukung upaya antara solusi permanen antara pemerintah Myanmar dan Bangladesh (Erozden, 2018). Selain itu, Turki berupaya untuk membantu menyelesaikan permasalahan Rohingya yang sedang terjadi. Dukungan Turki akan HAM dari etnis Rohingya ini dapat dilihat dari *press release* yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri Turki No: 224, pada 27 Agustus 2018 tentang Krisis Kemanusiaan Muslim Rohingya. Dalam *press release* itu Dewan HAM PBB menyatakan bahwa pelanggaran HAM yang dilakukan terhadap Rohingya sama dengan kejahatan berat di bawah hukum internasional. Terlepas dari langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintah Myanmar dan dialog yang terjadi antara Bangladesh dan Myanmar menuju penyelesaian krisis, akan tetapi proses repatriasi resmi belum dimulai. Turki meminta Pemerintah Myanmar untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam bekerja sama dengan komunitas internasional dengan tujuan untuk mencapai solusi yang baik bagi krisis ini serta menciptakan kondisi yang kondusif di Negara Bagian Rakhine untuk pengembalian yang aman, bermartabat, dan berkelanjutan bagi Muslim Rohingya. Turki telah berusaha keras untuk memastikan bahwa komunitas internasional memberikan perhatian yang diperlukan untuk masalah ini sejak awal krisis ini.

Dalam konteks ini, adanya pertemuan Konsultasi Rohingya Internasional, di Ankara untuk bertukar pandangan antara negara-negara yang sepaham dan organisasi internasional yang aktif di wilayah tersebut untuk membahas cara-cara dan sarana untuk mencegah semakin memburuknya kondisi kemanusiaan di Rohingya. Turki juga bertekad untuk mendukung semua upaya yang diarahkan untuk menjaga masalah ini dalam agenda komunitas internasional dan untuk menemukan solusi yang baik untuk krisis ini dalam dialog dengan Myanmar dan Bangladesh (Republic Turkey Ministry of Foreign Affairs, 2018).

2. Perubahan Kebijakan Luar Negeri Turki Pasca Partai AKP Berkuasa

Pasca pemilihan nasional pada tahun 2002, kebijakan luar negeri Turki mulai berubah, hal ini dipengaruhi oleh doktrin dari kepala penasihat kebijakan luar negeri pemerintah baru tentang "*strategic depth*." Implikasi dari doktrin "*strategic depth*" terwujud dalam semua aspek keamanan nasional Turki dan kebijakan luar negeri. Konsep "*strategic depth*" dalam kebijakan luar negeri Turki mengacu pada karya akademis Profesor Ahmet Davutoglu, yang menerbitkan buku hubungan internasional Turki dengan judul *stratejik derinlik* pada tahun 2001. Isi utama buku Davutoglu adalah nilai suatu negara dalam politik dunia didasarkan pada lokasi geo-strategis dan kedalaman historisnya. Mengikuti logika teori Davutoglu yang dijelaskannya, Turki memang dianugerahi keduanya karena lokasinya di daerah geopolitik yang berpengaruh, terutama kontrolnya atas *Bosphorus* (selat yang memisahkan Turki bagian Eropa dan bagian Asia), dan peninggalan historisnya dari Kekaisaran Ottoman (Walker, 2007, p. 33).

Strategic Depth mengadvokasi upaya untuk mengimbangi ketergantungan Turki pada Barat dengan merangkul banyak aliansi untuk menjaga keseimbangan kekuasaan di wilayahnya. Inti dari argumen ini adalah Turki tidak harus bergantung pada satu aktor dan Turki juga harus secara aktif mencari cara untuk menyeimbangkan hubungannya sehingga dapat mempertahankan independensi yang optimal. Pada pemilihan presiden tanggal 3 November 2002, Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) yang baru dibentuk, memenangkan suara di Turki dan, untuk pertama kalinya, sebuah partai dengan akar Islam secara eksplisit memiliki mayoritas besar di Majelis Nasional Turki atau *Turkish Grand National Assembly* (TGNA). Recep Tayyip Erdogan selaku pemimpin partai AKP yang menjabat menjadi perdana menteri dengan cepat meminta Davutoglu untuk menjadi penasihat kebijakan luar negerinya. Davutoglu diberikan kebebasan untuk membentuk kebijakan luar negeri Turki dengan menerapkan doktrin *strategic depth*-nya (Walker, 2007, p. 34).

Ahmet Davutoglu sendiri mengakui, sejak AKP menjadi partai pemerintah dengan posisi dominan di parlemen Turki, 'paradigma baru' muncul dalam kebijakan luar negeri Turki. Menggunakan sumber-sumber yang lebih Islami untuk lebih mendekatkan diri dengan negara-negara yang ada di sekitar Turki, hal ini berpengaruh untuk memajukan visi baru Turki untuk memainkan peran penting sebagai peserta dalam tatanan dunia multi-dimensi yang muncul, dimana Turki masih dalam hubungan positif dengan Amerika Serikat, tetapi Turki juga aktif di Eropa, Timur Tengah dan Asia Tengah. Bercermin pada tren dari masa neo-Ottoman dalam

kehidupan intelektual Turki. Menurut Richard Falk, Davutoglu menekankan karakter 'akomodatif' Kekaisaran Ottoman pada puncaknya. Kebijakan luar negeri pemerintah Erdogan di bawah bimbingan Davutoglu mencari kebijakan luar negeri 'tanpa konflik' untuk Turki, serta keseimbangan antara hubungan dengan Eropa, Timur Tengah, Asia, dan dengan Amerika Serikat (Murinson, 2006, pp. 960-961). Konsep baru dari kebijakan luar negeri Turki ini memiliki tiga pilar utama; Pilar pertama yaitu perdamaian Turki dengan identitas dirinya yang islami dan kembali pada akar Ottoman dahulu. Pilar kedua adalah menanamkan rasa akan kebesaran Ottoman dan percaya diri pada saat politik luar negeri serta menghilangkan rasa rendah diri di hadapan negara lain. Pilar ke tiga selalu terbuka terhadap Barat dan melakukan hubungan yang berimbang dengan Timur Tengah (Dani, 2017).

Perubahan politik luar negeri Turki ini dibuktikan dengan bantuan Turki kepada etnis Rohingya yang ada di Bangladesh ataupun di Myanmar terkait isu-isu kemanusiaan, Turki mencoba membantu dan bekerjasama dengan Myanmar untuk mencari solusi dengan cara yang damai. Turki datang membantu Etnis Rohingya yang terusir dan tidak diakui oleh negaranya sendiri, dimana mereka dibantai dengan kejam dengan tujuan untuk membersihkan Etnis Rohingya dari Arakan (Choirul, 2012). Selain itu, Turki juga semakin meningkatkan kegiatannya ke Bangladesh pada tahun 2017, ketika gelombang baru Muslim Rohingya berlindung di Bangladesh karena krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung. Dalam konteks ini, Emine Erdoğan, istri dari Presiden Turki bersama dengan, Mevlüt Çavuşoğlu, Menteri Luar Negeri Turki, melakukan kunjungan pada 6-7 September 2017 dan Recep Akdağ, Wakil Perdana Menteri Turki melakukan kunjungan pada tanggal 27 September 2017 ke Bangladesh, untuk memeriksa kondisi kehidupan Muslim Rohingya dan membahas upaya bantuan kemanusiaan Turki. Kunjungan terbaru dari Turki ke Bangladesh adalah Kunjungan Binali Yıldırım pada 18-20 Desember 2017. Perdana Menteri mengadakan pertemuan dengan Abdul Hamid, Presiden Bangladesh dan Sheikh Hasina, Perdana Menteri Bangladesh dan mengunjungi Kamp Rohingya di Cox's Bazaar (Republic of Turkey Ministry of Foreign Affairs, 2017).

Berdasarkan pada pendekatan Turki terhadap negara-negara di timur tengah dan juga di asia untuk menggabungkan nilai sejarah-budaya dan sosial-budaya dengan tujuan ekonomi dan politik. Aspek budaya dan sejarah diasumsikan membuka jalan bagi objek kebijakan luar negeri AKP yang proaktif. Hubungan Turki dengan Bangladesh adalah contoh tentang bagaimana hubungan ekonomi / komersial dapat dipupuk dari kesamaan budaya dan nilai-nilai umum kedua negara

(Baba, 2017, p. 577). Akan tetapi pada tahun 2016, hubungan Turki dan Bangladesh menjadi kompleks. Hal ini karena Bangladesh mengemukakan permintaan Turki yang secara berturut-turut meminta untuk membebaskan beberapa pemimpin *Jamaat-e-Islami* Bangladesh, salah satunya Mir Quasem Ali yang merupakan pemimpin partai Jamaat e-Islami yang dihukum mati karena kejahatan perang selama Perang Pembebasan Bangladesh oleh Pengadilan Kejahatan Internasional di Bangladesh pada tahun 2013. Akan tetapi, menurut Faisal Mahmud di dalam artikelnya yang berjudul "*Rohingya crisis brings Turkey and Bangladesh closer*", ia menyebutkan bahwa krisis pengungsi Rohingya yang ada di Bangladesh juga menyebabkan hubungan antara Turki dan Bangladesh kembali membaik. Hal ini juga disebabkan oleh banyaknya bantuan yang dikirim oleh Turki untuk para pengungsi yang ada di Bangladesh (Mahmud, 2017).

Binali Yildirim, selaku perdana menteri Turki, pada kunjungan selama dua hari ke Bangladesh, juga ikut membantu membagikan beberapa makanan yang didistribusikan TIKa, dan meresmikan fasilitas medis di kamp pengungsi Balukhali di Cox's Bazar. Perdana Menteri Binali Yildirim juga memuji pemerintah Bangladesh atas upayanya dalam "membantu" etnis Rohingya. Dalam konferensi pers menjelang kunjungan resminya ke Bangladesh, Yildirim mengatakan kunjungan itu bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah regional seperti krisis Rohingya dan untuk meningkatkan hubungan antara kedua negara. "Kami akan memiliki kesempatan untuk sekali lagi menggarisbawahi bahwa Turki siap untuk memberikan segala cara untuk berkontribusi dalam masa-masa sulit yang sedang dialami Bangladesh," sebut Yildirim (Hurriyet Daily News, 2017).

Bahkan disela-sela kunjungannya, Binali Yildirim menyatakan niat Turki untuk lebih meningkatkan perdagangan dan hubungan ekonomi dengan Bangladesh. Dan pada kunjungan kali itu, Bangladesh dan Turki menandatangani dua dokumen bilateral untuk meningkatkan kerja sama di bidang usaha kecil dan menengah dan mempertahankan standar produk. Perjanjian yang ditandatangani oleh pemerintah Turki dan Bangladesh saat itu adalah Nota Kesepahaman antara Yayasan Usaha Kecil dan Menengah Bangladesh serta Organisasi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah Turki, dan MoU lainnya adalah antara Bangladesh Standards and Testing Institution (BSTI) yang lembaga pemerintah di bawah Kementerian Perindustrian yang dibentuk untuk tujuan mengendalikan standar layanan dan kualitas barang dengan Turkish Standards Institution (TSE). Instrumen kerjasama ini mencakup bidang-bidang seperti usaha kecil dan menengah, produksi

industri, standarisasi, pengembangan kapasitas, serta berbagi pengetahuan dan pengembangan keterampilan (The Daily Star, 2017).

Munshi Fayez Ahmed, selaku ketua Institut Studi Internasional dan Strategis Bangladesh (BIISS) mengatakan bahwa kebijakan Turki untuk membantu Bangladesh dalam menghadapi kasus krisis pengungsi Rohingya ini jelas membantu kedua negara untuk memperbaiki hubungan mereka yang berantakan sejak 2016 silam (Mahmud, 2017). Bangladesh dan Turki bahkan sepakat untuk memperdalam ikatan ekonomi dan bekerja sama untuk membantu mewujudkan solusi bagi krisis Rohingya. Kerjasama ini berfokus pada bidang-bidang utama seperti perdagangan dan investasi, pertahanan, pendidikan, pariwisata dan konektivitas (Dhaka Tribune, 2017).

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan diatas, dapat disimpulkan bahwa Turki mendukung Hak Asasi etnis Rohingya. Turki sendiri berupaya untuk membantu untuk menyelesaikan permasalahan Rohingya yang sedang terjadi. Bahkan pasca adanya penolakan dari pemerintah Bangladesh terhadap pengungsi Rohingya, pemerintah Turki meminta Bangladesh untuk kembali menerima pengungsi Rohingya dan Turki bersedia untuk menanggung seluruh biaya yang dikeluarkan Bangladesh kepada pengungsi Rohingya, yang merupakan respon Turki terhadap penindasan HAM yang terjadi terhadap etnis Rohingya.

Keterlibatan Turki dalam kasus ini tidak dapat dilepaskan dari peran AKP didalamnya. Pasca pemilihan nasional pada tahun 2002, kebijakan luar negeri Turki mulai berubah, hal ini dipengaruhi oleh doktrin dari kepala penasihat kebijakan luar negeri pemerintah baru tentang "*strategic depth*." Perubahan kebijakan Turki yang awalnya lebih Pro-Barat kini secara perlahan mulai bergeser orientasinya ke Negara Dunia Timur. Tidak hanya ke bagian Timur akan tetapi Turki juga mulai meningkatkan Hubungannya ke daerah Asia, salah satunya Bangladesh, dimana Turki memang memiliki hubungan yang panjang dengan Bangladesh, akan tetapi hubungan kedua negara menjadi renggang pada tahun 2016. Kasus krisis pengungsi Rohingya sendiri kembali membuat hubungan Turki dan Bangladesh mendekat. Mendekatnya hubungan Turki dan Bangladesh tidak lepas dari peran Turki yang bersedia membantu pengungsi Rohingya di Bangladesh.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Burcill, S., & Linklater, A. (2005). *Theories of International Relations*. New York: Palgrave MacMillan.
- Coplin, W. D., & Marbun, M. (1992). *Pengantar Politik Internasional Suatu Telaah Teoretis*. Bandung: Sinar Baru.
- Jackson, R., & Sorensen, G. (2013). *Pengantar Studi Hubungan Internasional Teori dan Pendekatan, edisi ke-5*. New York: Oxford University Press.

Jurnal:

- Baba, G. (2017). The Waves of Turkey's Proactive Foreign Policy Hitting South-Asian Coasts: Turkey-Bangladesh Relations. *Yönetim Bilimleri Dergisi/Journal of Administrative Sciences Cilt / Volume: 15, Sayı / N: 30, ss. / pp.:573-584*.
- Casier, M. (2009). Contesting the 'Truth' of Turkey's Human Rights Situation: State-Association Interactions in and outside the Southeast. *European Journal of Turkish Studies Social Sciences on Contemporary Turkey*, 9.
- Dani, T. R. (2017). Kebijakan Turki Terhadap Etnis Rohingya di Myanmar di Bawah Kepemimpinan Partai Adelet ve Kalkinma Partisi (AKP) dari Tahun 2012-2016.
- Junaidi, A. (2016). Kebijakan Politik Recep Tayyip Erdogan dan Islamisme Turki Kontemporer. *Politik Islam*.
- Mastur, A. (2015). Keterkaitan Politik Domestik dan Pengambilan Kebijakan Luar Negeri. *Analisis Kebijakan Luar Negeri*.
- Mery, & Olivia, Y. (2015). Sikap Bangladesh Dalam Menanggapi Program UNHCR "United Nations Joint Initiative" Terhadap Penanganan Pengungsi Rohingya (Periode 2006-2011). *Jurnal Transnasional*, 1194-1196.
- Murinson, A. (2006). The Strategic Depth Doctrine of Turkish Foreign Policy. *Middle Eastern Studies*, Vol. 42, No. 6, 945 – 964.

- Neta, Y. (2013). Partisipasi Masyarakat Terhadap Penegakan Hak Asasi Manusia Di Negara Demokrasi Indonesia. *ISBN : 978-602-17813-0-2 MONOGRAF, VOLUME 1*.
- Siregar, N. O. (2014). Perlindungan terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat di Korea Utara Menurut Hukum Internasional. *Journal of International Law Vol 2, No 1*.
- Walker, J. W. (2007). Learning Strategic Depth: Implications of Turkey's New Foreign Policy Doctrine. *Insight Turkey Vol. 9 / Number 3, 32-47*.
- Waluyo, T. J. (2013). Konflik Tak Seimbang Etnis Rohingya dan Etnis Rakhine di Myanmar. *Jurnal Transnasional, 838-839*.
- Yasyid, F. N. (2017). Dampak Pengusiran Etnis Rohingya Oleh Myanmar Terhadap Keamanan Bangladesh. *eJournal Ilmu Hubungan Internasional, Volume 5, Nomor 4, 1287-1300*.

Report:

- AFAD. (2017). *AFAD's Humanitarian Aid to Rohingya Refugees in Bangladesh – Report No: 1 – as of December 4th*. Turkey: Republic of Turkey Ministry of Interior Disaster and Emergency Management Authority.
- European Commission. (2018). The Rohingya Crisis. *European Civil Protection and Humanitarian Aid Operation, 2*.
- Fermalasari, Z. F. (2015). Keterlibatan Turki Dalam Konflik Xinjiang Tahun 2009. 3-5.
- HRW. (2018). *"Bangladesh Is Not My Country" The Plight of Rohingya Refugees from Myanma*. United States of America: Human Rights Watch.
- Noor, F. A. (2015). *Rohingya Refugees: Turks to the Rescue*. Singapore: RSIS Documentary.
- Republic of Turkey Ministry of Foreign Affairs. (2016). *Turkey-Bangladesh Economic and Trade Relations*. Retrieved Januari 23, 2019, from [mfa.gov.tr](http://www.mfa.gov.tr): http://www.mfa.gov.tr/turkey_bangladesh-economic-and-trade-relations.en.mfa
- Republic of Turkey Ministry of Foreign Affairs. (2017). *Turkey– Bangladesh Relations*. Retrieved Januari 16, 2019, from <http://www.mfa.gov.tr>: <http://www.mfa.gov.tr/turkey%E2%80%93bangladesh-relations.en.mfa>

Republic Turkey Ministry of Foreign Affairs. (2018, Agustus 27). *No: 224, 27 August 2018, Press Release Regarding The Humanitarian Crisis Of Rohingya Muslims*. Retrieved Januari 14, 2019, from Republic Turkey Ministry of Foreign Affairs: [http://www.mfa.gov.tr/no - 224 -rohinga-muslumanlarinin-yasadigi-insani-kriz-hk_en.en.mfa](http://www.mfa.gov.tr/no-224-rohinga-muslumanlarinin-yasadigi-insani-kriz-hk_en.en.mfa)

UNHCR. (2017, desember 15). *UNHCR distributes aid to Rohingya refugees ahead of Bangladesh winter*. Retrieved maret 22, 2018, from UNHCR.org: <http://www.unhcr.org/news/briefing/2017/12/5a3399624/unhcr-distributes-aid-rohingya-refugees-ahead-bangladesh-winter.html>

Internet:

Ahmed, S. (2014, Mei 5). *Khilafat Movement*. Retrieved Januari 1, 2019, from Banglapedia: http://en.banglapedia.org/index.php?title=Khilafat_Movement

Aira. (2010, November 15). *Turkey, Bangladesh forge links, seek higher cooperation in trade*. Retrieved Januari 1, 2019, from Turkish News: <https://www.turkishnews.com/en/content/2010/11/15/turkey-bangladesh-forge-links-seek-higher-cooperation-in-trade/>

BSS. (2017, Desember 14). *Erdogan assures Bangladesh of continuing assistance on the Rohingya issue*. Retrieved Januari 4, 2019, from Dhaka Tribune: <https://www.dhakatribune.com/bangladesh/foreign-affairs/2017/12/14/erdogan-assures-bangladesh-continuing-assistance-rohingya-issue>

Choirul. (2012, Agustus 14). *Jumpa Muslim Myanmar, Istri PM Turki Menangis*. Retrieved Januari 16, 2019, from Tempo: <https://dunia.tempo.co/read/423463/jumpa-muslim-myanmar-istri-pm-turki-menangis/full&view=ok>

D, A. (2016, November 28). *Bangladesh Tolak Lagi Pengungsi Rohingya*. Retrieved Januari 7, 2019, from Tirto: <https://tirto.id/bangladesh-tolak-lagi-pengungsi-rohingya-b5QN>

Dhaka Tribune. (2017, Desember 19). *Turkey to continue support to Rohingyas, improve economic ties with Bangladesh*. Retrieved Januari 26, 2019, from Dhaka Tribune: <https://www.dhakatribune.com/bangladesh/foreign-affairs/2017/12/19/turkey-continue-support-rohingyas-improve-economic-ties-bangladesh>

- Erozden, C. (2018, Agustus 27). *Turkey reiterates support for Rohingya Muslims*. Retrieved Januari 26, 2019, from AA.com: <https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/turkey-reiterates-support-for-rohingya-muslims/1240403>
- Hurriyet Daily News. (2017, Desember 18). *Turkey praises Bangladesh over support to Rohingya*. Retrieved Januari 2, 2019, from Hurriyet Daily News: <http://www.hurriyetdailynews.com/turkey-praises-bangladesh-over-support-to-rohingya-124305>
- hurriyetdailynews. (2017, September 10). *Erdoğan urges Muslim countries to help Rohingya*. Retrieved Januari 26, 2019, from hurriyet daily news: <http://www.hurriyetdailynews.com/erdogan-urges-muslim-countries-to-help-rohingya-117774>
- Mahmud, F. (2017, Desember 22). *Rohingya crisis brings Turkey and Bangladesh closer*. Retrieved Januari 2, 2019, from Al Jazeera: <https://www.aljazeera.com/news/2017/12/rohingya-crisis-brings-turkey-bangladesh-closer-171222140806764.html>
- Mehmet, F. H. (2018, Agustus 22). *Turkey at forefront of giving aid to Rohingya refugees*. Retrieved Januari 26, 2019, from AA.com: <https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/turkey-at-forefront-of-giving-aid-to-rohingya-refugees/1237059>
- Mubyarto, P. D. (2004). *Ekonomi dan Kemiskinan*. Retrieved Maret 22, 2018, from <http://www.ekonomikerakyatan.ugm.ac.id/My%20Web/sembul14.htm>
- Muhaimin. (2017, September 2). *Tanggung Biaya, Turki Minta Bangladesh Buka Pintu untuk Rohingya*. Retrieved Oktober 20, 2018, from International Sindonews: <https://international.sindonews.com/read/1236001/43/tanggung-biaya-turki-minta-bangladesh-buka-pintu-untuk-rohingya-1504329567>
- Novia, D. M., & Murdaningsih, D. (2017, september 02). *Turki Siap Biayai Kebutuhan Pengungsi Rohingya di Bangladesh*. Retrieved maret 22, 2018, from repblika.co.id: <http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/17/09/02/ovnof5-turki-siap-biayai-kebutuhan-pengungsi-rohingya-di-bangladesh>

- NU. (2016, Juli 21). *Balajar dari Kemajuan dan Kegagalan Turki*. Retrieved April 18, 2018, from nu.or.id: <http://www.nu.or.id/post/read/69866/balajar-dari-kemajuan-dan-kegagalan-turki>
- Ramani, S. (2016, Juli 4). *Can Bangladesh and Turkey Mend Frayed Ties?* Retrieved Januari 1, 2019, from The Diplomat: <https://thediplomat.com/2016/07/can-bangladesh-and-turkey-mend-frayed-ties/>
- Tempo.co. (2017, September 2). *Bangladesh Buka Pintu, Turki Janji Bayar Biaya Menampung Rohingya*. Retrieved januari 7, 2019, from Tempo: <https://dunia.tempo.co/read/905414/bangladesh-buka-pintu-turki-janji-bayar-biaya-menampung-rohingya/full&view=ok>
- The Daily Star. (2017, Desember 20). *Turkey to help Rohingyas in Bangladesh*. Retrieved Januari 29, 2019, from the daily star: <https://www.thedailystar.net/frontpage/turkey-help-rohingyas-bangladesh-1507528>
- Tokgoz, M. (2018, Desember 12). *Bangladesh hails Turkey's efforts over Rohingya crisis*. Retrieved Januari 4, 2019, from Anadolu Agency: <https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/bangladesh-hails-turkeys-efforts-over-rohingya-crisis/1336794>
- Tokyay, M. (2017, September 7). *Turkish aid agency offers a lifeline to Rohingya Muslims*. Retrieved Janari 26, 2019, from Arab News: <http://www.arabnews.com/node/1157041/middle-east>
- Wijaya, P. (2016, november 22). *Ini kronologi lengkap kekerasan terhadap muslim Rohingya di Myanmar*. Retrieved maret 21, 2018, from merdeka.com: <https://www.merdeka.com/dunia/ini-kronologi-lengkap-kekerasan-terhadap-muslim-rohingya-di-myanmar.html>
- WorldBank. (2018). *Bangladesh*. Retrieved April 18, 2018, from worldbank.org: <https://data.worldbank.org/country/bangladesh>
- Zaman, S. S. (2016, September 9). *Turkey Wants To Restore Ties With Bangladesh*. Retrieved Januari 2, 2019, from Dhaka Tribune: <https://www.dhakatribune.com/bangladesh/2016/09/09/turkey-wants-restore-ties-bangladesh/>